DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 22 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Ketua DPRD Desak SPPG Bersertifikat Laik Palsu Diproses Hukum

SIDOARJO – Dugaan penggunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu oleh tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat sorotan beragam kalangan. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendesak agar pengelola yang terbukti sengaja menggunakan dokumen palsu diproses sesuai ketentuan hukum.

Menurut Nasih, kasus tersebut dinilai menjadi peringatan penting bagi pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kelengkapan perizinan dan standar sanitasi tempat pengolahan makanan. Nasih mengatakan, temuan itu harus menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh izin operasional SPPG.

"Kalau itu memang ada niat jahat, seharusnya diproses hukum," katanya. Menurutnya, perbedaan unsur kesengajaan dan kesalahan administrasi penting untuk menentukan langkah penanganan. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen palsu, penegakan hukum harus dilakukan.

> Kalau itu memang ada niat jahat, seharusnya diproses hukum."
>
> **Abdillah Nasih**
> *Ketua DPRD Sidoarjo*

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuantina menyatakan, keputusan untuk melaporkan dugaan penggunaan SLHS palsu ke kepolisian diserahkan kepada pengelola SPPG. Meski begitu, pemerintah daerah disebut telah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. "Informasinya Bupati sudah berkomunikasi dengan kepolisian terkait masalah ini," ungkapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 153 SPPG di Sidoarjo, tujuh di antaranya belum mengantongi SLHS. **(ful/hen)**

MENOLAK: Warga Desa Karangtanjung, Candi, memasang spanduk protes dan melarang truk material proyek perumahan masuk jalan desa tanpa izin.

Protes Truk Proyek Lewat Jalan Desa, Warga Blokade Akses Perumahan

Pemdes Karangtanjung Mediasi dengan Pengembang

SIDOARJO – Lalu-lalang truk pengangkut material proyek perumahan di Dusun Tanjungsari, Desa Karangtanjung, Candi, memicu protes warga. Tak terima jalan desa digunakan untuk aktivitas proyek tanpa izin dan kesepakatan, warga memblokade akses menuju perumahan.

Hingga kemarin (21/10), persoalan tersebut belum menemukan titik temu. Upaya mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar masih terkendala sulitnya menghadirkan pihak pengembang untuk memberikan penjelasan kepada warga.

Kepala Desa Karangtanjung Atmo mengatakan, pemerintah desa masih berupaya mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan penggunaan jalan desa itu tidak berlarut-larut. "Mereka (pengembang, Red) sulit ditemui. Kami coba memediasi antarpihak," kata Atmo kemarin (21/10).

Dia mengatakan, jalan desa yang dipakai untuk lalu-lalang truk proyek merupakan akses menuju makam. Itu merupakan aset desa. Jalan tersebut tidak pernah disewakan maupun dijual kepada pengembang.

Terkait tuntutan warga, Atmo mengaku belum bisa memastikan apakah jalan yang diblokade akan ditutup sementara atau permanen. "Namun, aspirasi warga mengarah pada penutupan permanen agar akses tidak lagi digunakan untuk aktivitas proyek perumahan," kata Atmo.

Lahan Diuruk, tapi Belum Lunas

Keberatan warga bukan semata-mata karena truk proyek melintasi jalan desa. Rusmini, salah satu warga yang rumahnya berada di depan lokasi blokade, mengatakan bahwa warga tidak ingin akses menuju makam rusak karena proyek.

Selain persoalan jalan, warga mempersoalkan lahan di dekat makam yang telah diuruk, tetapi disebut belum dilunasi pengembang. Rusmini mengaku mendapat informasi bahwa lahan tersebut rencananya akan digunakan sebagai makam khusus untuk penghuni perumahan. "Kalau nggak salah mau digunakan makam. Namun, tidak ada pemberitahuan," terangnya. **(ful/hen)**

Jemaah Mulai Masuk Asrama 10 April 2027

Tertuang dalam Rencana Perjalanan Haji

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengeluarkan rencana perjalanan haji 2027. Calon jemaah haji (CJH) dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 10 April, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap hingga 10 Mei.

Jadwal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji 26/2026. Berdasarkan rencana itu, pemberangkatan gelombang pertama berlangsung pada 11–25 April dari Indonesia menuju Madinah. Sementara itu, gelombang kedua diberangkatkan ke Jeddah pada 26 April hingga 10 Mei.

Puncak ibadah haji dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Mei. Jemaah bergerak dari Makkah menuju Arafah pada 14 Mei (selengkapnya baca grafis).

Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan, rencana perjalanan haji menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji, mulai dari penerimaan jemaah di embarkasi hingga pemberangkatan dan pelayanan di Arab Saudi.

Menurut dia, rata-rata masa tinggal jemaah di Arab Saudi berkisar 38–40 hari. Karena itu, koordinasi antarsatuan kerja di embarkasi perlu dipersiapkan sejak dini. "Penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh-jauh hari," ujarnya.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengapresiasi penerbitan rencana perjalanan haji 2027 lebih awal. Menurut dia, kepastian jadwal sejak dini memberikan waktu lebih panjang bagi jemaah dan penyelenggara untuk mempersiapkan keberangkatan. Pada tahun sebelumnya, jadwal kerap baru dirilis mendekati atau saat memasuki Ramadan. **(wan/aph)**

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Melanggar, 15 Bangunan Liar di Gedangan Dibongkar Satpol PP

DITERTIBKAN: Pembongkaran bangunan liar di frontage road Gedangan, Sidoarjo, Rabu (21/10).

RADAR SIDOARJO.ID

Di Sepanjang Frontage Road

GEDANGAN-Penertiban bangunan liar di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo terus berlanjut. Setelah membongkar delapan bangunan liar (bangli) di segmen Waru pekan lalu, Satpol PP Sidoarjo kini menyasar segmen Gedangan. Sebanyak 15 bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya dibongkar pada Rabu (21/10) pagi.

Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan di sepanjang frontage road, memperlancar arus lalu lintas, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mengurai kemacetan di Jalan A Yani.

Sebanyak 300 personel gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI diterjunkan untuk mendukung proses pembongkaran sekaligus memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, penertiban menyasar bangunan tanpa izin yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di sisi barat frontage road.

Menurut dia, keberadaan bangunan dan aktivitas perdagangan di kawasan

Melanggar, 15 Bangunan...

tersebut berpotensi mengganggu fungsi jalan. Terlebih, aktivitas jual beli kerap menimbulkan kebutuhan parkir yang dapat meluber hingga badan jalan.

"Frontage ini dibangun pemerintah untuk mengurai kemacetan di Jalan A. Yani. Karena itu, kami melakukan penertiban agar lalu lintas lebih lancar dan menghindari kecelakaan akibat penggunaan jalan yang tidak semestinya," ujarnya.

Selain mendukung kelancaran lalu lintas, penertiban dilakukan untuk memperbaiki estetika kawasan. Keberadaan bangunan yang tidak tertata dinilai membuat lingkungan di sepanjang frontage road terkesan kumuh.

Yany menegaskan, pembongkaran tidak berhenti di segmen Gedangan. Setelah penertiban di Waru dan Gedangan, Satpol PP berencana melanjutkan kegiatan serupa ke segmen Buduran sekitar dua pekan mendatang.

Namun, tidak seluruh bangunan di sepanjang frontage road langsung dibongkar. Penertiban diprioritaskan terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT KAI maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, bangunan yang berada di atas lahan bersertifikat milik perseorangan atau perusahaan masih memerlukan pemetaan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemilik aset.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Sidoarjo Raden Novianto Koesno Adi Putro menjelaskan, 15 bangunan yang dibongkar tersebar di sejumlah titik di segmen Gedangan. (dik/vga)

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

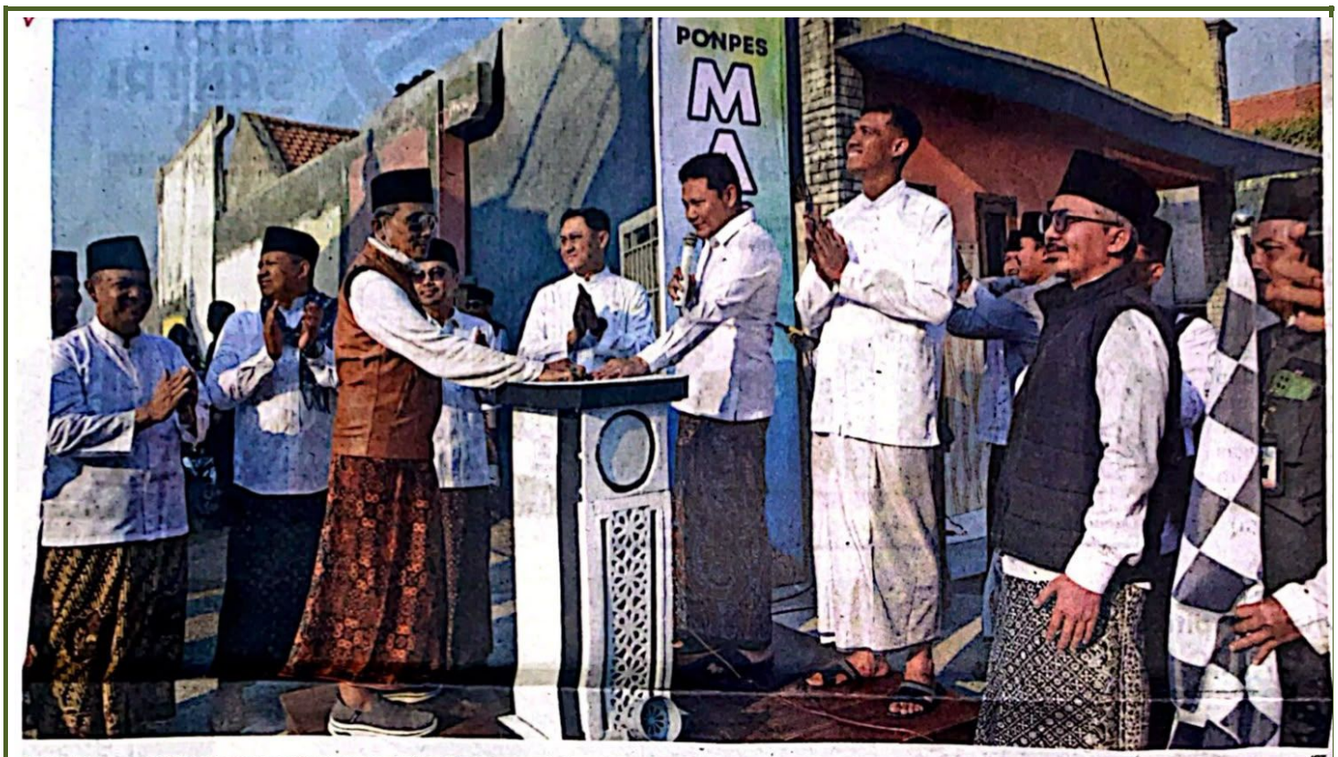

MERIAH: Bupati Sidoarjo Subandi secara resmi melepas peserta touring dari Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Putat, Kecamatan Tanggulangin. IST

Peringati Hari Santri, Bupati Lepas Touring Motoran Santun

TANGGULANGIN-Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Sidoarjo dimeriahkan dengan kegiatan touring bertajuk Motoran Santun, Rabu (21/10). Ratusan santri mengikuti kegiatan yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kesantunan dalam berkendara tersebut.

FENOMENA

Bupati Sidoarjo Subandi secara resmi melepas peserta touring dari Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Putat, Kecamatan Tanggulangin. Pelepasan ditandai dengan menekan tombol sebagai tanda dimulainya perjalanan.

Dari titik pemberangkatan, peserta melintasi sejumlah wilayah, yakni Tanggulangin, Tulangan, Pilang, Wonoayu, hingga Sidoarjo Kota. Rombongan dijadwalkan mengakhiri perjalanan di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo sekaligus Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin, M.Pd.I., serta anggota DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar.

Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para ulama, dan ratusan santri.

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

Peringati Hari Santri,...

Subandi mengaku bangga dapat memperingati Hari Santri bersama jajaran Forkopimda, ulama, dan para santri. Menurut dia, santri memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. "Alhamdulillah, kita bangga bisa bersama-sama memperingati Hari Santri, bersama Forkopimda, para ulama, dan santri," ujarnya.

Ia menegaskan, santri merupakan aset masa depan Indonesia. Karena itu, para santri diharapkan terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

"Santri adalah aset masa depan. Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada para santri. Santri hebat, bangsa hebat," kata Subandi.

Di hadapan para peserta, Subandi juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik. "Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah," tuturnya.

Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengusung tema Motoran Santun. Tema itu menjadi pengingat bagi seluruh peserta agar tetap menjaga adab dan mematuhi aturan selama berkendara. "Di jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan mana pun. Tetap santun dalam berkendara dan tidak boleh salip-menyalip," pesannya.

Menurut Abdul Wahid, kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan pemberitaan positif tentang santri sekaligus memperkuat citra santri sebagai generasi yang santun dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Ia juga berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kebersamaan di tengah keprihatinan atas peristiwa keracunan yang menimpa ratusan santri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). (dik/vga)

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jemaah Mulai Masuk Asrama 10 April 2027

Tertuang dalam Rencana Perjalanan Haji

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengeluarkan rencana perjalanan haji 2027. Calon jemaah haji (CJH) dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 10 April, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap hingga 10 Mei.

Jadwal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji 26/2026. Berdasarkan rencana itu, pemberangkatan gelombang pertama berlangsung pada 11–25 April dari Indonesia menuju Madinah. Sementara itu, gelombang kedua diberangkatkan ke Jeddah pada 26 April hingga 10 Mei.

Puncak ibadah haji dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Mei. Jemaah bergerak dari Makkah menuju Arafah pada 14 Mei (selengkapnya baca grafis).

Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan, rencana perjalanan haji menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji, mulai dari penerimaan jemaah di embarkasi hingga pemberangkatan dan pelayanan di Arab Saudi.

Menurut dia, rata-rata masa tinggal jemaah di Arab Saudi berkisar 38–40 hari. Karena itu, koordinasi antarsatuan kerja di embarkasi perlu dipersiapkan sejak dini. "Penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh-jauh hari," ujarnya.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengapresiasi penerbitan rencana perjalanan haji 2027 lebih awal. Menurut dia, kepastian jadwal sejak dini memberikan waktu lebih panjang bagi jemaah dan penyelenggara untuk mempersiapkan keberangkatan. Pada tahun sebelumnya, jadwal kerap baru dirilis mendekati atau saat memasuki Ramadan. **(wan/aph)**

Tahapan Perjalanan Haji (RPH) 2027

10 April
CJH mulai masuk asrama haji

11-25 April
Pemberangkatan gelombang I dari Indonesia ke Madinah

26 April - 10 Mei
Pemberangkatan gelombang II dari Indonesia ke Jeddah

14 Mei
Pergerakan CJH dari Makkah menuju Arafah

15 Mei
Pelaksanaan wukuf di Arafah

16 Mei
Hari Raya Iduladha

17–19 Mei
Hari-hari Tasyrik

21 Mei–4 Juni
Pemulangan Gelombang I dari Jeddah menuju Indonesia

5–20 Juni
Pemulangan Gelombang II dari Madinah menuju Indonesia

Sumber: Kemenhaj

GRAFIS: ADIT/JAWA POS

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

APBDES MLIRIPROWO

Penanganan Kasus Dugaan Penyelewengan Dinilai Lamban

SIDOARJO – Audit dari Inspektorat Sidoarjo sudah diterima Kejari Sidoarjo. Kejaksaan juga sudah mendatangi Balai Desa Mliriprowo. Namun, penanganan kasus dugaan penyelewengan APBDes di desa tersebut terkesan lamban.

> Kami berharap kejari bisa mempercepat prosesnya."
>
> **M. Shobiri Jaelani**
> *Ketua BPD Mliriprowo*

Hal itu dikeluhkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mliriprowo yang mendatangi Kantor Kejari Sidoarjo kemarin (21/10). Mereka mendesak kasus segera diusut. Karena laporan masuk sebenarnya sudah 10 bulan lalu.

Ketua BPD Mliriprowo M. Shobiri Jaelani menjelaskan, hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Bahkan, dia mengaku belum mengetahui apakah ada saksi-saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. "Kami berharap Kejari bisa mempercepat prosesnya," ujarnya.

Menurut Shobiri, kepastian perkembangan laporan sangat dinantikan warga. "Kejari menjanjikan akan mengusut perkara tersebut dan memberikan transparansi proses hukum," tambahnya. Tak hanya mendatangi kejaksaan, BPD dan warga juga menyambangi Inspektorat Sidoarjo. Mereka mempertanyakan hasil audit APBDes Mliriprowo, termasuk memastikan apakah hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada kejaksaan.

Kasipidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo menjelaskan, hasil audit APBDes Mliriprowo memang telah dilimpahkan oleh Inspektorat. Namun, pihaknya masih mempelajari dokumen tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. **(eza/hen)**

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

MENOLAK: Warga Desa Karangtanjung, Candi, memasang spanduk protes dan melarang truk material proyek perumahan masuk jalan desa tanpa izin.

Protes Truk Proyek Lewat Jalan Desa, Warga Blokade Akses Perumahan

Pemdes Karangtanjung Mediasi dengan Pengembang

SIDOARJO – Lalu-lalang truk pengangkut material proyek perumahan di Dusun Tanjungsari, Desa Karangtanjung, Candi, memicu protes warga. Tak terima jalan desa digunakan untuk aktivitas proyek tanpa izin dan kesepakatan, warga memblokade akses menuju perumahan.

Hingga kemarin (21/10), persoalan tersebut belum menemukan titik temu. Upaya mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar masih terkendala sulitnya menghadirkan pihak pengembang untuk memberikan penjelasan kepada warga.

Kepala Desa Karangtanjung Atmo mengatakan, pemerintah desa masih berupaya mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan penggunaan jalan desa itu tidak berlarut-larut. "Mereka (pengembang, Red) sulit ditemui. Kami coba memediasi antarpihak," kata Atmo kemarin (21/10).

Dia mengatakan, jalan desa yang dipakai untuk lalu-lalang truk proyek merupakan akses menuju makam. Itu merupakan aset desa. Jalan tersebut tidak pernah disewakan maupun dijual kepada pengembang.

Terkait tuntutan warga, Atmo mengaku belum bisa memastikan apakah jalan yang diblokade akan ditutup sementara atau permanen. "Namun, aspirasi warga mengarah pada penutupan permanen agar akses tidak lagi digunakan untuk aktivitas proyek perumahan," kata Atmo.

Lahan Diuruk, tapi Belum Lunas

Keberatan warga bukan semata-mata karena truk proyek melintasi jalan desa. Rusmini, salah satu warga yang rumahnya berada di depan lokasi blokade, mengatakan bahwa warga tidak ingin akses menuju makam rusak karena proyek.

Selain persoalan jalan, warga mempersoalkan lahan di dekat makam yang telah diuruk, tetapi disebut belum dilunasi pengembang. Rusmini mengaku mendapat informasi bahwa lahan tersebut rencananya akan digunakan sebagai makam khusus untuk penghuni perumahan. "Kalau nggak salah mau digunakan makam. Namun, tidak ada pemberitahuan," terangnya. **(ful/hen)**

Jawa Pos

110 Santri Kampanye Tertib Lalu Lintas Bareng Kapolresta

SIDOARJO – Kampanye keselamatan berlalu lintas menyemarakkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Sidoarjo. Sebanyak 110 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikam, Tanggulangin, mengikuti Motoran Santun bersama Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kemarin (21/10).

Bobby menegaskan, sikap santun yang menjadi bagian dari keh[illegible] santri perlu diterapkan ketika berada di jalan raya. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. "Santri itu harus santun, termasuk saat di jalan raya. Kuncinya, pakai helm, patuhi aturan, dan hargai pengguna jalan lain," ujarnya.

Dia berharap, pesan keselamatan tersebut tidak berhenti selama kegiatan berlangsung. Para santri diharapkan dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas di lingkungan masing-masing sekaligus menularkan kebiasaan berkendara yang aman kepada masyarakat.

Pengasuh Ponpes Manba'ul Hikam KH Abdul Wahid Harun mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia menilai, Motoran Santun menjadi kesempatan bagi para santri untuk mengenal lebih dekat pentingnya keselamatan berkendara. "Ini jadi momen juga memperkenalkan keselamatan berkendara bagi santri," katanya. **(eza/hen)**

MOTORAN SANTUN: Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra (dua dari kiri) [illegible] memperingati HSN kemarin (21/10).

POLRESTA SIDOARJO

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Desak SPPG Bersertifikat Laik Palsu Diproses Hukum

SIDOARJO – Dugaan penggunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu oleh tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat sorotan beragam kalangan. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendesak agar pengelola yang terbukti sengaja menggunakan dokumen palsu diproses sesuai ketentuan hukum.

Menurut Nasih, kasus tersebut dinilai menjadi peringatan penting bagi pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kelengkapan perizinan dan standar sanitasi tempat pengolahan makanan. Nasih mengatakan, temuan itu harus menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh izin operasional SPPG.

"Kalau itu memang ada niat jahat, seharusnya diproses hukum," katanya. Menurutnya, perbedaan unsur kesengajaan dan kesalahan administrasi penting untuk menentukan langkah penanganan. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen palsu, penegakan hukum harus dilakukan.

> Kalau itu memang ada niat jahat, seharusnya diproses hukum."
>
> **Abdillah Nasih**
> *Ketua DPRD Sidoarjo*

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuantina menyatakan, keputusan untuk melaporkan dugaan penggunaan SLHS palsu ke kepolisian diserahkan kepada pengelola SPPG. Meski begitu, pemerintah daerah disebut telah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. "Informasinya Bupati sudah berkomunikasi dengan kepolisian terkait masalah ini," ungkapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 153 SPPG di Sidoarjo, tujuh di antaranya belum mengantongi SLHS. **(ful/hen)**

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ANGGER BONDAN/JAWA POS

PEMBONGKARAN: Sebanyak 32 bangli dirobohkan karena berdiri tanpa izin di sekitar frontage road kemarin (21/10).

Penataan Frontage Road Terkendala Bangunan Ber-SHM

SIDOARJO – Penertiban bangunan di sepanjang Frontage Road (FR) Gedangan–Buduran belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Sekitar 50 bangunan di sisi barat atau kanan jalan masih belum ditertibkan karena berada di atas lahan yang memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Kasatpol PP Sidoarjo Yany Setiyawan mengatakan, bangunan di atas lahan milik perorangan atau perusahaan belum ditertibkan karena status kepemilikannya berbeda. "Tidak semua kami tertibkan. Ada bangunan di atas persil milik perorangan atau perusahaan yang belum kami tertibkan," katanya.

Yany menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, jumlah bangunan di sisi kanan FR mencapai lebih dari 100 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 bangunan berada di lahan yang memiliki hak milik, sedangkan sisanya berdiri di atas lahan PT KAI.

Untuk bangunan yang berdiri di atas lahan milik perorangan atau perusahaan, Satpol PP masih akan berkoordinasi dengan bupati guna menentukan langkah selanjutnya. "Sesuai arahan Bupati, pemilik akan diajak berbicara untuk menata frontage agar lebih baik," paparnya.

Plt Kabid Tibumtranmas Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah bangunan warung yang berada di atas lahan bersertifikat hak milik akan dibongkar. Terkait kemungkinan ganti rugi, Novianto juga belum dapat memastikan. "Kami belum bisa pastikan apakah akan dibongkar atau tidak. Masih akan kami panggil untuk koordinasikan kembali," katanya. **(eza/hen)**

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Forkopimda dan Warga Sidoarjo Doa Bersama Minta Turun Hujan

Prihatin Karhutla Meluas

Sidoarjo, Memorandum

Prihatin dengan banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai daerah di Indonesia serta cuaca panas akibat kemarau panjang, jajaran TNI/Polri bersama Pemkab dan ratusan masyarakat di Sidoarjo menggelar aksi doa bersama memohon turun hujan.

Doa bersama yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn ini digelar di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten *Sidoarjo, Selasa malam (20/10).*

Ratusan perwakilan elemen masyarakat, jajaran Forkopimda, OPD, TNI-Polri, alim ulama, hingga tokoh lintas agama tampak khusyuk mengikuti jalannya doa. Doa bersama diawali istighotsah yang dipimpin oleh KH Rofiq Siradj, memohon ampunan dan diturunkannya hujan yang berkah.

Acara kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh pemuka lintas agama, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan ditutup dengan doa dari pemuka agama Islam.

Bupati Sidoarjo H Subandi mengatakan, doa bersama ini merupakan ikhtiar spiritual setelah berbagai upaya teknis dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

"Mudah-mudahan segera hujan, dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia segera reda. Ini ikhtiar kita bersama agar Sidoarjo dan Indonesia dijauhkan dari bencana," ujar Subandi.

Ia berharap melalui doa bersama ini, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa pekan terakhir segera berakhir dan tidak berdampak pada krisis air bersih dan gagal panen bagi petani. **(jok/fdn)**

Doa bersama memohon hujan.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kapolresta Sidoarjo motoran santun bareng santri.

AKBP Bobby Motoran Santun Bareng Santri Ponpes Manba'ul Hikam

Sidoarjo, Memorandum

Memperingati Hari Santri Nasional 2026 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, Polresta Sidoarjo menggelar aksi unik bertajuk "Motoran Santun". Kegiatan ini mengajak para santri untuk tertib berlalu lintas dengan selalu menggunakan helm.

Acara diikuti oleh puluhan santri dari Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Kegiatan ini didukung oleh Satlantas Polresta Sidoarjo dan jajaran Forkopimda.

Acara diawali dengan apel dan pelepasan di depan Ponpes Manba'ul Hikam. Terlihat Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra bersama Bupati Sidoarjo H Subandi dan Pengasuh Ponpes KH Abdul Wahid Harun melakukan pemencetan tombol sirine sebagai tanda dimulainya Motoran Santun.

Dengan mengenakan baju koko putih dan sarung, Kapolresta, Bupati dan para santri tampak kompak mengendarai motor dengan tertib dan santun. Semua peserta wajib menggunakan helm SNI, sebagai contoh edukasi berkendara yang aman.

Rombongan motoran santun ini menempuh rute dari Ponpes Manba'ul Hikam Tanggulangin menuju Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Di sepanjang jalan, rombongan santri yang berkonvoi rapi ini menarik perhatian warga.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra mengatakan, kegiatan Motoran Santun ini bukan sekadar konvoi, melainkan kampanye keselamatan.

"Melalui momentum Hari Santri Nasional, kami ingin mengajak seluruh santri dan masyarakat Sidoarjo untuk menjadi pelopor tertib berlalu lintas. Santri itu harus santun, termasuk saat di jalan raya. Kuncinya, pakai helm, patuhi aturan, dan hargai pengguna jalan lain," ujar Bobby.

Pengasuh Ponpes Manba'ul Hikam, KH. Abdul Wahid Harun mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ini adalah edukasi yang baik bagi santri agar paham pentingnya keselamatan berkendara. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. **(jok/fdn)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DINAS DIKBUD

M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

SIAP KERJA: Plh Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman (dua dari kiri) menyemangati anggota Dewan Pendidikan yang dilantik.

Dewan Pendidikan Diminta Ikut Tekan Angka Putus Sekolah

SIDOARJO – Angka anak putus sekolah di Kota Delta masih mencapai ribuan. Dewan Pendidikan Sidoarjo diminta ikut menurunkan angka anak putus sekolah. Permintaan itu disampaikan saat 11 anggota Dewan Pendidikan Sidoarjo periode 2026–2031 dikukuhkan di Pendopo Delta Wibawa kemarin (21/10).

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, pembangunan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan kerja sama antara Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, serta pemangku kepentingan lainnya. "Jangan saling egois, semua harus bersama-sama membangun pendidikan yang lebih maju dan bermartabat," katanya.

Kepala Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo berharap Dewan Pendidikan dapat membantu memetakan persoalan yang dihadapi sekolah. Dengan begitu, kebijakan dan program yang disusun pemkab bisa lebih tepat sasaran. "Kalau masalah terpetakan, maka kita bisa menyusun program yang tepat," terangnya. **(ful/hen)**

Jawa Pos

HSN 2026, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Motoran Santun Bersama Santri

TRENDING #4 Pembebasan Lahan untuk Flyover Gedangan Berjalan Sesuai Rencana

PENA INDONESIA
INFORMASI JERNIH UNTUK INDONESIA

Cari sesuatu

Beranda Nasional Daerah Pemerintahan Politik Hukum dan Kriminal Lainnya Indeks Berita

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Hari Santri Nasional (HSN) 2026 digelar dengan tema " Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas". Dalam kegiatan hari santri ini Pemkab Sidoarjo menggelar motoran santun yang diberangkatkan dari Pendopo Delta Wibawa menuju Yayasan

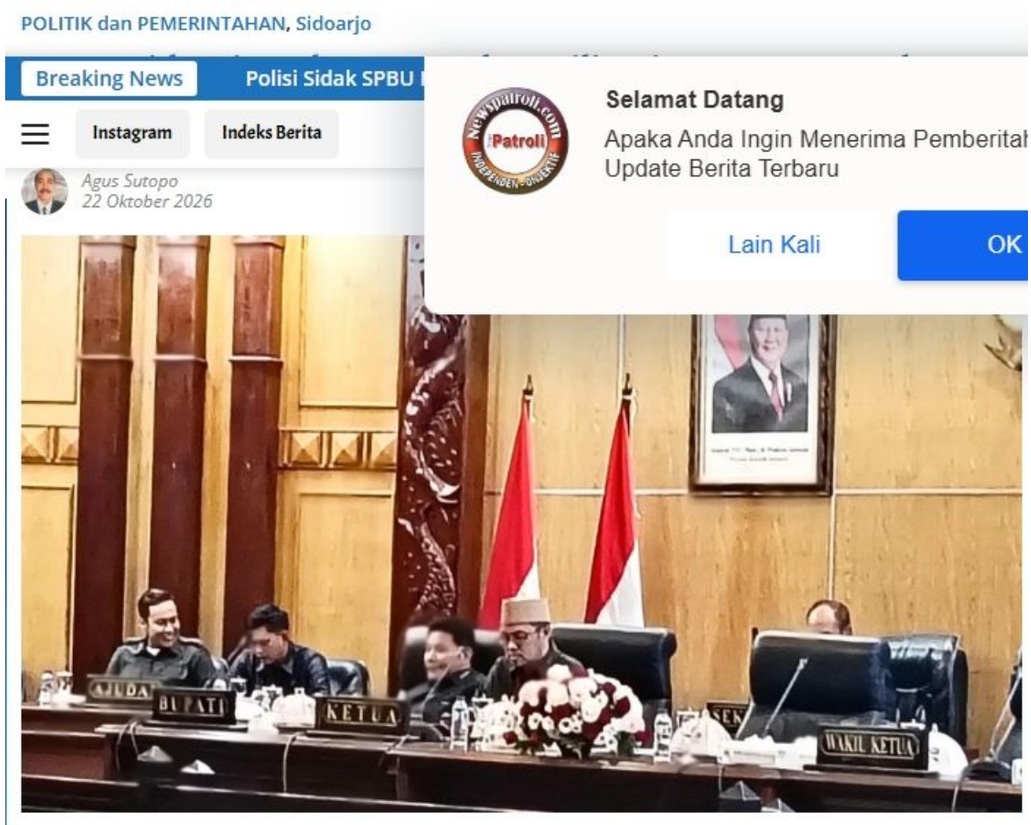

News PATROLI.COM

Sidoarjo – News PATROLI.COM –

DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren sebagai upaya memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pondok pesantren. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri, memperkuat kelembagaan pesantren, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi D DPRD Sidoarjo Tentang Fasilitasi Pesantren

@Lensa Global
Rabu, 21 Oktober 2026, Oktober 21, 2026 WIB

Komentar ()

SURABAYA||*LENSA-GLOBAL.com* - DPRD kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pesantren, pada Rabu (21/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih dihadiri Bupati H.Subandi SH,M.Kn. dan pejabat dari unsur Forkompinda Sidoarjo serta pejabat OPD jajaran Pemkab Sidoarjo.

Abah Nasih-sapaan akrabnya- mengatakan penyusunan Raperda ini merupakan inisiasi Komisi D DPRD Sidoarjo. Perumusan kebijakan itu juga merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2019, yang menempatkan pesantren pada tiga fungsi. Di antaranya sebagai lembaga pendidikan, dakwa dan pemberdayaan masyarakat

Ditambahkan, pembentukan Raperda bisa menjadi pintu kebaikan dan bermanfaat bagi pondok pesantren. Selain itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah Sidoarjo dalam menunjang pendidikan di pesantren, sehingga para santri juga bisa mengembangkan potensi dirinya.

"Raperda ini tentunya bisa menjadi kado Hari Santri Nasional," kata Abah Nasih.

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren,

Rabu, 21 Oktober 2026 15:44 WIB

Admin - Author Cari Peta Wilayah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:44 WIB

Juru Bicara Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar, menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2026 terkait Raperda tentang Fasilitasi Pesantren di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. (Dok. Syaiful)

A A A

Berita Terkait

DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan pesantren. Beli Kalender

Komisi D Sidoarjo Inisiasi Raperda Fasilitas Pesantren

by cakrajatim — 22 Oktober 2026 in Infrastruktur 0

0 SHARES 2 VIEWS Share on Twitter Share on FB

Sidoarjo – cakra jatim. Com: DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pesantren, pada Rabu (21/10/2026) siang tadi. Rancangan regulasi ini merupakan inisiasi Komisi D DPRD yang menjadi payung hukum pemberdayaan dan kemandirian kelembagaan pondok pesantren di Sidoarjo, selain juga bentuk hadirnya pemerintahan Kab. Sidoarjo.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih S.M dihadiri Bupati H.Subandi SH,M.Kn. Selain itu, pejabat dari unsur Forkompinda Sidoarjo, berikut pejabat OPD jajaran Pemkab Sidoarjo hadir dalam paripurna penyampaian Laporan Komisi D DPRD terhadap Raperda Fasilitas Pesantren tersebut.

RELATED POSTS

Resto 116 Taman Lecehkan Karyawan

KDMP Desa Tambakrejo Beri Solusi Pupuk

Cak Nasih, sapaan pimpinan sidang mengatakan, penyusunan Raperda ini merupakan inisiasi Komisi D DPRD Sidoarjo. Perumusan kebijakan itu juga merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2019, yang menempatkan pesantren pada tiga fungsi. Di antaranya sebagai lembaga pendidikan, dakwa dan pemberdayaan masyarakat.

Ditambahkan, pembentukan Raperda bisa menjadi pintu kebaikan dan bermanfaat bagi pondok pesantren. Selain itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah Sidoarjo dalam menunjang pendidikan di pesantren, sehingga para santri juga bisa mengembangkan potensi dirinya. "Raperda ini tentunya bisa menjadi kado Hari Santri Nasional," kata Cak Nasih.

Sementara itu, Zahlul Yussar, anggota sekaligus juru bicara Komisi D DPRD Sidoarjo mengemukakan penyusunan Raperda telah melalui berbagai tahapan,–bahkan saat ini memasuki pembahasan akhir dan sudah selesai. "Jadi tinggal disahkan saja. Sesuai jadwal paling lambat disahkan dalam bulan ini," ujarnya.

Diungkapkan penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi dan konsultasi berbagai pihak. Termasuk dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, tenaga ahli akademisi, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu melibatkan perwakilan pondok pesantren, serta pengurus cabang organisasi kemasyarakatan. "Fasilitasi pesantren merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ujar politikus Partai Demokrat tersebut. (hd)

BERITA POPULER

Sidoarjo Kembali OTT
0 SHARES

02 Razia Kenda Sejumlah M
0 SHARES

03 Anam dan A Terjungkal
0 SHARES

04 Paripurna D 16 Anggota
0 SHARES

05 Pertikaian B ke BK
0 SHARES

Berita Pilihan

Re Ka
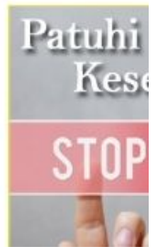
Kc Ra